

## Pertamina Rugi Rp 6,5 Triliun



Sumber: [www.lensaindonesia.com](http://www.lensaindonesia.com)

**JAKARTA, KOMPAS** – Kenaikan harga elpiji nonsubsidi yang semula Rp 3.959 per kilogram direvisi menjadi Rp 1.000 per kilogram. Penurunan harga ini mempertimbangkan daya beli masyarakat. Namun, sikap pemerintah dalam masalah ini dikritik beberapa kalangan.

Terkait dengan polemik kenaikan harga yang terjadi dalam beberapa hari ini, sebuah rapat konsultasi diadakan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Senin (6/1). Rapat dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, serta Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan dan sejumlah pejabat BPK.

Dahlan menjelaskan, keputusan menaikkan harga Rp 1.000 per kg antara lain mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kekhawatiran akan meningkatnya permintaan gas subsidi 3 kilogram.

Dengan kenaikan hanya sebesar Rp 1.000 per kg, ujar Dahlan, PT Pertamina masih akan merugi Rp 6,5 triliun pada tahun 2014 ini. PT Pertamina juga harus sabar menggapai cita-cita menjadi perusahaan raksasa seperti yang dikehendaki masyarakat. "Mungkin untuk mencapai itu masih perlu kesabaran," ujar Dahlan.

Pertamina sebetulnya sudah mengajukan kenaikan harga sejak empat tahun lalu. Namun, hingga dinaikkan pada 1 Januari lalu, permintaan Pertamina belum dikabulkan walau kenaikan harga elpiji 12 kg merupakan kewenangan penuh Pertamina.

Rapat konsultasi digelar di BPK karena kenaikan harga elpiji nonsubsidi per 1 Januari 2014 merupakan salah satu rekomendasi<sup>1</sup> BPK. BPK yang menemukan kerugian sebesar Rp 7,7 triliun dari bisnis penjualan elpiji mulai periode Januari 2011 sampai Oktober 2012.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, kemarin, di Jakarta, menyatakan, hasil rapat umum pemegang saham (RUPS)<sup>2</sup> adalah kenaikan harga elpiji 12 kg direvisi menjadi rata-rata Rp 14.200 per tabung atau naik 17,3 persen dari harga lama (sebelum 1 Januari 2014). Jadi, harga elpiji 12 kg per tabung di tingkat agen jadi Rp 89.000 sampai Rp 120.100 (tergantung dari lokasi) mulai 7 Januari 2014 pukul 00.00.

Karen menegaskan, Pertamina tidak memonopoli<sup>3</sup> bisnis elpiji 12 kg karena harga komoditas itu tidak disubsidi<sup>4</sup> atau tidak diatur dalam regulasi<sup>5</sup> pemerintah.

Beberapa kalangan mengkritik sikap pemerintah yang seolah-olah tidak mengetahui rencana kenaikan harga elpiji ini.

Politisi Partai Golkar, Akbar Tandjung, mempertanyakan sikap Presiden yang sangat responsif, khususnya mengenai kenaikan harga elpiji ini. Namun, disayangkan, dalam banyak masalah lain, Presiden tak tanggap seperti saat ini.

Secara terpisah, Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, menilai kenaikan harga elpiji merupakan drama politik yang mengorbankan rakyat. "Seakan-akan Presiden dan kendaraan politiknya prorakyat. Namun, intinya, rakyat yang dikorbankan dalam drama politik ini. Sebab, risikonya adalah rentetan inflasi<sup>6</sup> berbagai kebutuhan yang ditanggung masyarakat," ujar Airlangga.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengatakan, naif kalau pemerintah tidak tahu rencana kenaikan harga elpiji. "Seperti mekanisme RUPS, pemegang saham dominan<sup>7</sup> kan harus diberi tahu kalau perusahaan mengambil kebijakan atau keputusan," katanya. (INA/NTA/AHA/EVY)

**Sumber berita:** *Kompas*, Selasa, 7 Januari 2014, Halaman 1.

---

<sup>1</sup> **Rekomendasi:** saran dari pemeriksa, dhi. BPK, berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, dhi. Pertamina.

<sup>2</sup> **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):** organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Wewenang tersebut meliputi penetapan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan laporan tahunan, penetapan penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan mengenai penggabungan dan peleburan serta pengambilalihan perseroan, serta penetapan pembubaran perseroan. Hasil RUPS memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan suatu perseroan.

<sup>3</sup> **Monopoli:** keadaan pasar barang tertentu yang penawarannya dikuasai oleh seorang atau sekelompok penjual yang menguasai atau menentukan tingkat harga atau jumlah barang atau jasa, dhi. bisnis elpiji 12 kg.

<sup>4</sup> **Komoditas:** bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu berdasarkan pertimbangan bahwa pemberian bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, misalnya untuk pengendalian harga barang kebutuhan pokok atau sumbangan dana pendidikan.

<sup>5</sup> **Regulasi:** pengaturan, peraturan perundang-undangan.

<sup>6</sup> **Inflasi:** kemerosotan nilai uang karena banyak dan cepatnya uang beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya konsumsi masyarakat yang meningkat dan ketidاكلancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh memengaruhi.

<sup>7</sup> **Pemegang Saham Dominan:** sering juga disebut sebagai pemegang saham mayoritas, merupakan pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan suatu perusahaan dengan persentase kepemilikan saham yang lebih banyak dari pemegang saham lainnya, 50% saham atau lebih perlu untuk tujuan ini. Tetapi dalam perusahaan yang telah masuk bursa saham atau sudah *go public*, maka suara terbanyak dapat diperoleh dengan menggabungkan pemegang saham minoritas sehingga mencapai lebih dari 50%.